



**PENYERAHAN LKPD *UNAUDITED* TA 2024 PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN DI SULAWESI BARAT**

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Rabu (26/03) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* TA 2024 Entitas Pemeriksaan (Pemerintah Provinsi/Kabupaten) Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun LKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan. Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPD tersebut kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Entitas Pemeriksaan yang telah menyerahkan LKPD *Unaudited* TA 2024 diantaranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju yang diserahkan oleh Para Kepala Daerah kepada BPK Sulbar melalui Kepala BPK Sulbar, **Frider Sinaga**. Dalam sambutannya, Frider mengapresiasi Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat yang telah menyampaikan LKPD *Unaudited* TA 2024 kepada BPK sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. “BPK mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyampaikan LKPD *Unaudited* TA 2024 kepada BPK secara tepat waktu mengingat masih terdapat dua entitas pemeriksaan yang belum menyampaikan LKPD *Unaudited* TA 2024 kepada BPK per Rabu, 26 Maret 2025 yakni Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.”

Pemeriksaan atas LKPD *Unaudited* TA 2024 tersebut akan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk kelancaran pemeriksaan atas LKPD TA 2024, kami mengharapkan komitmen, dukungan, dan sinergi Kepala Daerah beserta jajaran untuk dapat menyampaikan data, keterangan, dan dokumen yang dibutuhkan kepada tim pemeriksa serta turut serta menjaga integritas tim pemeriksa salah satunya dengan tidak memberikan fasilitas apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tim pemeriksa. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT